

TAJUK RENCANA

Pengetatan Protokol Kesehatan

KESADARAN masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap kesehatan selama ini dinilai sudah cukup tinggi, termasuk dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, dinamika aktivitas masyarakat DIY yang keluar daerah dan warga yang datang ke Yogyakarta selama ini juga cukup tinggi. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, dinamika tersebut tentu juga berisiko cukup tinggi pula terhadap kemungkinan adanya warga yang terpapar Covid-19.

Karena itu, tidak berlebihan kalau perhatian terhadap kesehatan menjadi salah satu bidang yang diprioritaskan oleh Pemda DIY. Bahkan Pemda DIY menjadikan masyarakat sebagai subjek kesehatan yang harus dijadikan komitmen bersama. Hal ini seperti diungkapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X seusai memimpin Apel Virtual Siaga Covid-19 dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-56, Kamis (12/11) di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan.

Menurut Sri Sultan, kebijakan tersebut tidak hanya diberlakukan saat menghadapi pandemi Covid-19, tetapi kebijakan ini sudah dilakukan dalam aspek kesehatan secara umum. Karena kesadaran masyarakat DIY terhadap kesehatan sudah cukup tinggi, seharusnya penerapan protokol kesehatan juga sudah menjadi kebiasaan, bukan sebagai beban. Kesadaran memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, diharapkan muncul atas kesadaran sendiri.

Sultan berharap seluruh masyarakat DIY tetap meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Bukan sekadar mematuhi protokol pencegahan Covid-

19, namun kebiasaan menjaga pola makan dan pola hidup agar apa yang menjadi cita-cita bersama bisa terwujud. Meskipun kesadaran kesehatan masyarakat DIY cukup tinggi, tetap ada tantangan terkait banyaknya pendatang yang mengakibatkan peningkatan kemajemukan masyarakat. Pendatang atau orang yang sering keluar-masuk DIY tentu punya kebiasaan berbeda. Mereka juga diharapkan punya kesadaran sebagai modal sosial, meskipun mereka pendatang.

Upaya lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan mencanangkan kawasan Malioboro sebagai kawasan wajib protokol kesehatan. Menurut Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, pencanangan ini tentunya juga dilandasi kenyataan bahwa Malioboro adalah 'pusat' orang keluar-masuk Yogyakarta.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo minta semua kepala daerah yang wilayahnya masuk zona merah Covid-19 agar meningkatkan testing. Menurut Ganjar, kepala daerah tidak perlu takut akan terjadi lonjakan warga positif terpapar Covid-19, jika dilakukan testing secara masif. Pemerintah Kabupaten/Kota juga diminta bersikap antisipatif dan prediktif, dengan memprioritaskan kelompok rentan yang memiliki komorbid.

Mengingat sampai saat ini jumlah warga yang terpapar Covid-19 masih cukup tinggi, maka pengetatan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. tentu saja kunci terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan itu sendiri. □



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Nilai Luhur Seorang Guru

PENDIDIKAN yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah dan masyarakat memerlukan kompetensi dalam arti luas. Guru selaku garda terdepan dalam pendidikan harus memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk menggambarkan kualifikasi seseorang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam melaksanakan tugasnya selaku guru.

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Permendiknas No 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa seorang guru (tenaga pendidik) dikategorikan kompeten apabila memiliki empat standar kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional.

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang berhubungan dengan tingkah laku guru yang harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang berakar pada filsafat Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Setiap orang pada dasarnya memiliki kepribadian yang berbeda. Begitu halnya dengan guru, memiliki perbedaan antara guru yang satu dengan guru lainnya, misal cara berpakaian, tindakan, cara berbicara khususnya dalam menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas, dan strategi menghadapi sebuah persoalan terkait peserta didik.

Namun pada intinya, kepribadian guru yang berbeda-beda tersebut tetap harus dapat menjadi 'jembatan' untuk membangun interaksi guru dengan peserta didik. Bisa dikatakan guru harus bisa menjadi mitra peserta didik dalam kebaikan.

Kompetensi sosial merupakan penyediaan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar, baik lingkungan kerja maupun lingkungan tempat tinggal. Peran yang dipikul guru dalam masyarakat berbeda dengan profesi lainnya. Dalam lingkungan masyarakat, guru di-

tuntut terampil berkomunikasi, bersikap simpatik dan kharismatik, dapat bergaul secara santun pada masyarakat dengan mengindahkan norma dan nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berkenaan dengan 'membaca' karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek, seperti moral, emosional, intelektual, sosial, ekonomi, dan kultural. Hal ini berimplikasi bahwa guru mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Harapannya adalah guru mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru harus menguasai bahan pelajaran yang diampu, melakukan persiapan diri dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku referensi dan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk mengikuti info terkini terkait perkembangan dan kemajuan zaman guna mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap kompetensi guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh dengan pengabdian diri berdasarkan panggilan jiwa atau hati nurani. Guru dengan segala mitra peserta nya tentu bekerja tidak sebatas dinding sekolah, setiap ruang dan waktu dengan penuh loyalitas dan dedikasi bekerja untuk anak bangsa demi mencapai tujuan bersama peserta didik mencapai cita-cita.

***) Uly Zahara Harahap, SMA Internasional Budi Mulia Dua, Yogya.**

Resesi dan Meningkatnya Angka Pengangguran

ANGKA pengangguran merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan suatu negara. Pengangguran menurut konsep International Labor Organization (ILO) yang diakomodasi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kondisi angkatan kerja (penduduk 15 tahun ke atas bukan sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya) yang tidak mempunyai pekerjaan. Namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa dalam mencari pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tapi belum bekerja.

Rilis data BPS terbaru menunjukkan terjadinya ledakan pengangguran serta terjadinya resesi ekonomi di Indonesia dikarenakan adanya terganggunya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran terbuka yang menjadi indikator penyerapan tenaga kerja mencapai 7,07% (9,77 juta orang). Angka ini menjadi tertinggi dalam delapan tahun terakhir serta mendekati angka ketika terjadi krisis global tahun 2011 yang mencapai 7,48%. Dalam rilis tersebut BPS juga menegaskan terjadinya resesi ekonomi di Indonesia dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua dan ketiga masing-masing 5,32% dan 3,49% dibandingkan tahun 2019.

Paling Terpukul

Dalam masa pandemi, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjaannya. Pekerja sektor formal yang paling berat dihantam wabah Covid-19 dengan penurunan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 4,59% poin. Kondisi ini terjadi karena pekerja sektor formal didominasi oleh pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yang mengalami penurunan kontribusi sebesar 4,28% poin.

Kondisi ini terjadi karena turunnya daya beli masyarakat. Indikasinya, penurunan konsumsi rumah tangga selama kuartal dua dan kuartal tiga tahun 2020 masing-masing mencapai 5,52%

Indyah Kusumaningrum

dan 4,04% dibandingkan kuartal yang sama tahun 2019. Akibatnya permintaan terhadap barang dan jasa menurun. Dampaknya, produksi juga menurun sehingga terjadilah PHK. Semua berdampak meningkatkan pengangguran secara tajam.

Selain PHK, dalam masa pandemi ini banyak perusahaan juga menerapkan pengurangan jam kerja karyawan. Akibatnya setengah penganggur (orang yang bekerja dengan jam kerja di bawah



KR-JOKO SANTOSO

jam kerja normal dan masih mencari kerja) melonjak cukup tajam pada Agustus 2020 sebesar 3,77% poin dibandingkan Agustus 2019. Keadaan yang sama diikuti melonjaknya pekerja paruh waktu (orang yang bekerja dengan jam kerja di bawah jam kerja normal tapi tidak mencari kerja) sebesar 3,42%.

Situasi ini mengakibatkan banyak pekerja yang sebelumnya memiliki jam kerja normal (35 jam keatas dalam seminggu) sekarang harus bekerja di bawah jam kerja normal. Di samping penurunan produksi juga adanya aturan jaga jarak dalam bekerja.

Pentingnya Visi Calon Kepala Daerah

VISI bagi calon Kepala Daerah (KDH) pada hakikatnya, adalah janji politik dan pertaruhan jabatan untuk dapat diwujudkan diakhir periode pengabdiannya, ketika calon menjabat menjadi KDH. Visi bukan slogan, semboyan atau pepesan tanpa makna dan bukan pula aspek formalitas. Esensi visi merupakan janji luhur, bagi calon KDH yang secara terencana dan terukur akan dapat diraih dan dibuktinyatakan. Sehingga diperlukan pengawalan secara ketat sejak proses penyusunan, sampai dengan pelaksanaan pencapaian visi bagi calon KDH. Visi akan dianggap sebagai bentuk kebohongan publik, apabila tidak tercapai.

Penentuan visi bagi calon KDH, tidak bisa berdasarkan coba-coba asal tersusun sekenanya. Namun dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi wilayah, potensi wilayah, sifat dan karakter masyarakat yang ada, serta mampu dengan tajam mem-forecast perkembangan wilayah untuk 5 tahun kedepan. Peran visi sangat sentral, karena akan menjadi haluan pembangunan daerah, sekaligus menjadi materi kampanye calon KDH.

Instrumen

Sudah tersedia mekanisme penyusunan visi bagi calon KDH yang dapat digunakan untuk mendesign visi dengan baik. Yaitu berupa dokumen RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah, RTRW dan KLHS sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, dan progam calon KDH yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah yang disertai pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 tahun. Maka visi calon KDH secara legal

Drajad Ruswandono

formal akan dituangkan dalam bentuk Perda tentang RPJMD dan akan menjadi landasan didalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa visi calon KDH, tidak bisa disusun asal-asalan sesuai keinginan pribadi, tanpa memperhatikan aturan yang ada dan aspek-aspek kewilayahan lainnya. Disamping itu, calon KDH juga harus cermat memperhatikan pencapaian visi KDH sebelumnya yang telah dilakukan. Seandainya visi tersebut telah mampu mendatangkan kesejahteraan, tidak ada salahnya visi dimaksud dapat dilanjutkan kembali. Penyusunan visi tidak bisa dengan prinsip yang penting 'asal beda' dengan periode sebelumnya.

Persoalan mendasar yang harus diketahui dan dipahami, bagi para calon KDH, agar dapat mewujudkan visi dengan baik yaitu sangat diperlukannya dukungan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus berbanding lurus dengan visi KDH. Namun ironisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat ini, hampir semua OPD terjebak pada kegiatan rutinitas akut. Bahkan ada penggunaan anggaran dan pegawai yang tidak paham dengan visi KDH-nya sendiri, sehingga tema pembangunan yang diusung setiap tahunnya berubah. Namun program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD, tetap itu-itu saja.

Terjebak

Tidak efektifnya penyeleng-

garaan pemerintahan daerah, seperti tersebut di atas disebabkan karena ASN pelaksananya terjebak dalam zona nyaman. Untuk itu, diperlukan keberanian bagi calon KDH mereformasi, manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk merunut efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, apakah sudah disusun atau belum, Kebijakan Umum KDH secara rutin setiap tahunnya. Kedua apakah sudah disusun atau belum, peraturan KDH tentang Pola Hubungan antar OPD. Dan ketiga apakah sudah dilakukan atau belum, kegiatan monitoring dan evaluasi Kebijakan Umum KDH.

Apabila ketiga komponen tersebut diungkit, maka akan berpengaruh terhadap seluruh sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hati-hati dengan 'jebakan' penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan menghambat tercapainya visi calon kepala daerah. □

***) Drajad Ruswandono, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY**

Pojok KR

Magma Gunung Merapi terus bergerak menuju permukaan secara perlahan.

- Cepat diantisipasi!

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, kinerja sektor unggulan harus dioptimalkan.

- Harus itu.

Malioboro dicanangkan sebagai kawasan wajib protokol kesehatan.

- Wajib dipatuhi.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსasahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwι, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'..Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ..Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%